



## Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Muhammad Fadhel Alfayed<sup>1\*</sup>, Yani Rizal<sup>2</sup>, Rinaldi Syahputra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ekonomi Pembangunan, Universitas Samudra, Indonesia.

\*Penulis Korespondensi: [muhammadfadhelalfayed@gmail.com](mailto:muhammadfadhelalfayed@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of Regional Expenditure and the Human Development Index on Economic Growth in Aceh Province. The research method used is quantitative, and the data will be analyzed according to the required model. Data processing was carried out using multiple linear regression with the Eviews10 software. The data source used is secondary data obtained from historical records available in published archives. The findings of the study reveal that Regional Expenditure has a positive but insignificant effect on Non-Oil and Gas Economic Growth in Aceh Province, while the Human Development Index also shows a positive but insignificant effect on Non-Oil and Gas Economic Growth in Aceh Province. Simultaneously, both variables do not have a significant effect on Non-Oil and Gas Economic Growth in Aceh Province. Based on the regression analysis, the R-squared ( $R^2$ ) value was recorded at 0.2166. This indicates that Regional Expenditure and the Human Development Index can explain 21.66% of the variation in Non-Oil and Gas Economic Growth in Aceh Province, while the remaining 78.34% is influenced by other variables not included in this research model, such as investment, unemployment rate, inflation, taxes, subsidies, export-import, international trade, exchange rates, and household consumption.*

**Keywords:** Aceh; Economic Growth; Human Development Index; Indonesia; Regional Expenditure.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif, dan data akan dianalisis sesuai dengan model yang dibutuhkan. Pengolahan data dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan perangkat Eviews10. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari catatan historical yang terdapat dalam arsip yang sudah dipublikasikan. Temuan dari penelitian mengungkapkan bahwa Belanja Daerah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas di Provinsi Aceh, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia juga menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas di Provinsi Aceh. Secara Simultan, kedua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas di Provinsi Aceh. Berdasarkan analisis regresi, nilai R-squared ( $R^2$ ) tercatat 0,2166. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia mampu menjelaskan variasi Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas di Provinsi Aceh sebesar 21,66%, sementara sisanya sebesar 78,34% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, seperti investasi, tingkat pengangguran, inflasi, pajak, subsidi, ekspor-impor, perdagangan internasional, nilai tukar dan konsumsi rumah tangga.

**Kata kunci:** Aceh; Belanja Daerah; Indeks Pembangunan Manusia; Indonesia; Pertumbuhan Ekonomi;

### 1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah karena mencerminkan peningkatan kapasitas produksi serta kesejahteraan masyarakat secara agregat. Dalam konteks daerah yang memiliki ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam, pengukuran pertumbuhan ekonomi tanpa sektor migas menjadi penting untuk menggambarkan kinerja ekonomi yang lebih riil dan berkelanjutan (Boediono, 2016; Yasin et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi tanpa migas dianggap lebih representatif dalam mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat karena tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas migas yang bersifat eksternal dan volatil (Todaro & Smith, 2013).

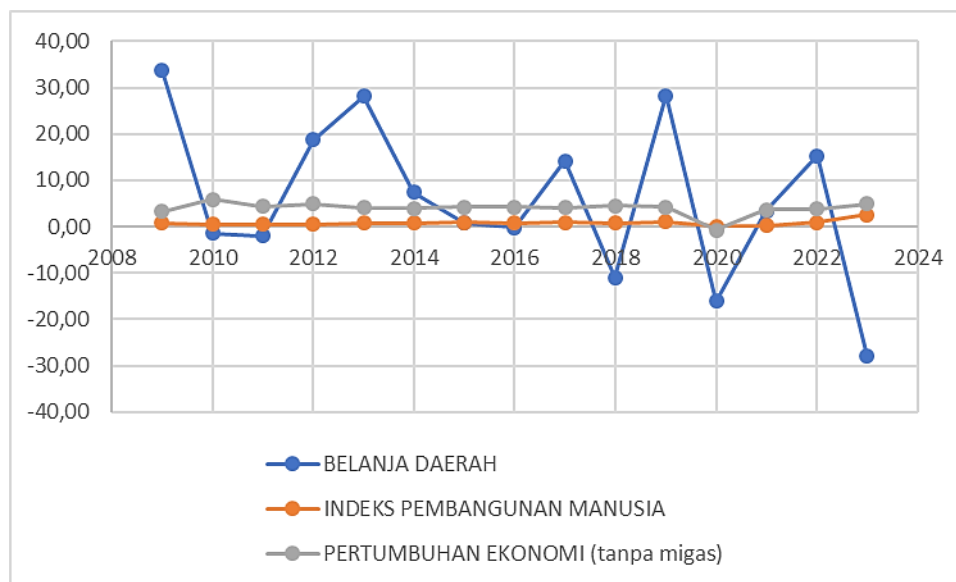
Belanja daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi non-migas melalui pengalokasian anggaran pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi lokal. Menurut teori Keynesian, belanja pemerintah mampu meningkatkan permintaan agregat dan menciptakan efek pengganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor-sektor riil di luar migas (Arsyad, 2010; Sabir et al., 2015). Namun demikian, efektivitas belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa migas sangat bergantung pada kualitas perencanaan anggaran, prioritas kebijakan, serta struktur ekonomi daerah.

Selain faktor fiskal, kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menjadi determinan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Teori human capital menjelaskan bahwa peningkatan pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya memperkuat sektor-sektor ekonomi non-migas dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Becker, 1964; Todaro & Smith, 2013). Dengan demikian, belanja daerah dan IPM memiliki keterkaitan erat dalam membentuk fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak bergantung pada sektor ekstraktif.

Provinsi Aceh merupakan wilayah yang relevan untuk dikaji karena memiliki sejarah ketergantungan terhadap sektor migas, sementara kontribusi sektor non-migas menjadi semakin penting dalam struktur perekonomian daerah. Meskipun belanja daerah Aceh relatif besar dan IPM menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi tanpa migas masih mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan kestabilan yang optimal (BPS, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah dan perbaikan kualitas pembangunan manusia belum sepenuhnya mampu mendorong penguatan sektor-sektor ekonomi non-migas secara konsisten.

Hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan belanja daerah, IPM, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan temuan yang beragam. Sejumlah penelitian menemukan bahwa belanja pemerintah dan IPM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk pada sektor non-migas (Setiawan & Budiana, 2015; Saragih & Azansyah, 2024), sementara penelitian lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan atau berbeda antar wilayah (Lestari & Fitrayati, 2014; Sutono et al., 2022). Ketidakkonsistenan hasil empiris tersebut menunjukkan adanya research gap, khususnya dalam mengkaji efektivitas belanja daerah dan IPM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada daerah dengan karakteristik fiskal dan struktur ekonomi khusus seperti Provinsi Aceh.

Untuk itu, penting dilakukan kajian lebih mendalam untuk memahami pengaruh belanja daerah dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2024 dapat di lihat. Perkembangan Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh selama 2009-2023 (Gambar 1).



**Gambar 1.** Belanja Daerah, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2009-2023.

*Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh 2024.*

Berdasarkan data tahun 2009–2023, belanja daerah Provinsi Aceh menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, belanja daerah mengalami pertumbuhan sebesar 33,72 persen. Namun, pada tahun 2010 belanja daerah menurun sebesar 1,50 persen dan kembali turun pada tahun 2011 sebesar 2,04 persen. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan belanja daerah yang cukup besar, yaitu sebesar 18,75 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2013 hingga mencapai 28,13 persen. Setelah itu, laju belanja daerah melambat pada tahun 2014 menjadi 7,36 persen dan turun signifikan pada tahun 2015 menjadi 0,75 persen.

Pada periode berikutnya, belanja daerah kembali berfluktuasi. Tahun 2016 mencatat penurunan sebesar 0,13 persen, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 14,14 persen. Tahun 2018 kembali mengalami kontraksi sebesar 11,04 persen, sebelum melonjak kembali pada tahun 2019 sebesar 28,29 persen. Dampak pandemi COVID-19 terlihat jelas pada tahun 2020, ketika belanja daerah turun tajam sebesar 16,12 persen. Pada tahun 2021 belanja daerah tumbuh sebesar 3,33 persen dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 15,27

persen. Namun, pada tahun 2023 belanja daerah kembali mengalami penurunan yang sangat besar, yaitu sebesar 28,01 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan pola yang lebih stabil dibandingkan belanja daerah. Sepanjang periode 2009–2014, IPM meningkat secara bertahap dari 0,79 pada tahun 2009 menjadi 0,75 pada tahun 2014, meskipun sempat stagnan pada tahun 2010 dan 2011 dengan nilai 0,54. Pada tahun 2015, IPM meningkat menjadi 0,93 dan tetap berada pada tren peningkatan hingga tahun 2019 yang mencapai 1,00. Pada masa pandemi tahun 2020, peningkatan IPM melambat dengan nilai 0,13, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,26 dan terus naik hingga mencapai 2,61 pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa IPM mengalami peningkatan yang relatif konsisten meskipun belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tanpa migas menunjukkan pola fluktuatif dengan rentang perubahan yang lebih moderat dibandingkan belanja daerah. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi tanpa migas tercatat sebesar 3,29 persen, kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2010 menjadi 5,91 persen atau naik sebesar 2,62 poin persentase. Pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,38 persen, kemudian kembali meningkat pada tahun 2012 menjadi 4,95 persen. Tahun 2013 dan 2014 menunjukkan perlambatan berturut-turut menjadi 4,15 persen dan 4,02 persen.

Pada periode 2015–2019, pertumbuhan ekonomi tanpa migas relatif stabil di kisaran 4 persen. Tahun 2015 tercatat sebesar 4,28 persen, sedikit menurun pada tahun 2016 menjadi 4,26 persen dan kembali turun pada tahun 2017 menjadi 4,13 persen. Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 4,49 persen, sebelum kembali melemah pada tahun 2019 menjadi 4,18 persen. Dampak pandemi COVID-19 terlihat sangat jelas pada tahun 2020 ketika pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami kontraksi sebesar 0,74 persen. Setelah itu, perekonomian mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,61 persen, meningkat pada tahun 2022 menjadi 3,80 persen, dan mencapai 4,91 persen pada tahun 2023.

Secara empiris, data menunjukkan bahwa perubahan belanja daerah yang sangat fluktuatif tidak selalu diikuti oleh perubahan pertumbuhan ekonomi tanpa migas dengan arah dan besaran yang sama. Di sisi lain, IPM cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengalami perlambatan atau kontraksi pada beberapa periode. Fakta ini menunjukkan bahwa hubungan antara belanja daerah, IPM, dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi Aceh tidak bersifat langsung dan linier, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan ekonometrika untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan melalui penggunaan data terbaru hingga tahun 2023 serta analisis yang berfokus pada dinamika pasca pandemi, sehingga dapat memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah daerah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi regional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, belanja daerah berfungsi sebagai alat intervensi pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengembangan sektor-sektor produktif (Prasetyo, 2017; Arsyad, 2010).

Secara teoretis, pendekatan Keynesian menjelaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang berdampak pada peningkatan produksi, pendapatan, dan kesempatan kerja, khususnya pada sektor riil di luar migas (Boediono, 2002). Selain itu, teori Wagner menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan kompleksitas ekonomi, peran pemerintah melalui belanja publik cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan layanan sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2018).

Namun, efektivitas belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas alokasi anggaran dan struktur perekonomian daerah. Belanja daerah yang tidak diarahkan pada sektor-sektor produktif berpotensi menimbulkan inefisiensi dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks daerah seperti Aceh, belanja daerah diharapkan mampu memperkuat sektor ekonomi non-migas agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

## **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS, 2023). IPM dipandang sebagai ukuran yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia, yang berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan ekonomi. Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan dalam kapasitas manusia untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi.

Teori human capital yang dikemukakan oleh Becker (1964) menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang lebih sehat dan berpendidikan memiliki kemampuan adaptasi, inovasi, dan efisiensi yang lebih baik, sehingga mampu mendorong peningkatan output ekonomi. Dalam konteks ini, IPM tidak hanya dipandang sebagai hasil pembangunan, tetapi juga sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Todaro & Smith, 2013).

Peningkatan IPM diharapkan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi sektor non-migas, karena sektor ini sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja dibandingkan sektor ekstraktif. Namun demikian, pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat langsung dan instan, melainkan memerlukan waktu serta didukung oleh kebijakan ekonomi yang kondusif agar peningkatan kualitas manusia dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kinerja ekonomi.

## **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah dalam periode tertentu dan umumnya diukur melalui perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi tanpa migas, yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja ekonomi riil di luar sektor minyak dan gas. Pendekatan ini penting karena sektor migas cenderung bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga komoditas global, sehingga kurang mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung (Boediono, 2014).

Teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor modal, tenaga kerja, dan teknologi. Solow menekankan bahwa peningkatan kualitas tenaga kerja dan kemajuan teknologi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Solow, 1956; Todaro & Smith, 2013). Dalam konteks ekonomi tanpa migas, pertumbuhan sangat ditentukan oleh kinerja

sektor-sektor seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, yang memerlukan dukungan kebijakan fiskal dan pembangunan manusia yang memadai.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tanpa migas dapat dipandang sebagai indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang berkelanjutan. Pertumbuhan yang stabil pada sektor non-migas menunjukkan adanya fondasi ekonomi yang lebih kuat, tidak bergantung pada sumber daya alam yang bersifat terbatas, serta lebih inklusif dalam menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus kajian pada bidang ekonomi pembangunan. Lokasi penelitian adalah Provinsi Aceh dengan periode pengamatan tahun 2009–2023. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa data belanja daerah, IPM, dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan data kualitatif digunakan untuk mendukung analisis melalui deskripsi kondisi ekonomi daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka dengan menelaah laporan resmi, publikasi statistik, serta literatur yang relevan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi tanpa migas yang diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa migas atas dasar harga konstan. Variabel independen terdiri atas belanja daerah dan Indeks Pembangunan Manusia. Belanja daerah merepresentasikan pengeluaran pemerintah daerah Aceh yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan IPM mencerminkan kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan jenis data time series. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh belanja daerah dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 10. Model regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots$$

Dimana:

Y	= Variabel dependen
$X_1, X_2, \dots, X_p$	= Variabel independen
$B_0, \beta_1, \dots, \beta_p$	= Koefisien regresi
e	= error

Selanjutnya, data tersebut diubah ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dianalisis dan dipahami, sehingga mempermudah dalam proses interpretasi.

$$PE = \beta_0 + \beta_1 BD + \beta_2 IPM + e$$

Dimana:

PE	= Pertumbuhan ekonomi
$B_0, \beta_1, \dots, \beta_p$	= Koefisien regresi linier berganda
BD	= Belanja daerah
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
e	= error

Sebelum pengujian hipotesis, model regresi diuji menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model memenuhi kriteria estimasi yang baik. Pengujian pengaruh variabel dilakukan melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) dengan tingkat signifikansi 5%. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi tanpa migas dianalisis menggunakan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Uji Asumsi Klasik

##### *Uji Normalitas*

**Tabel 1.** Hasil Uji Normalitas.

Mean	1.48e-16
Median	0.091664
Maximum	2.441201
Minimum	-3.361171
Std. Dev.	1.276867
Skewness	-0.826981
Kurtosis	4.855343



Jarque-Bera	3.861181
Probability	0.145063

*Sumber: estimate Eviews.*

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah residual yang telah distandarisasi pada model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis grafik *Normal Probability Plot*. Dalam metode ini, residual dianggap berdistribusi normal apabila titik-titik data pada grafik mendekati atau mengikuti garis diagonal. Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar  $3,861181 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari data penelitian memiliki distribusi normal.

### ***Uji Multikolinearitas***

**Tabel 2.** Hasil Uji Multikolinearitas.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.515996	4.069111	NA
Belanja Daerah	0.000503	1.257129	1.111443
Indeks Pembangunan Manusia	0.491834	3.649750	1.111443

*Sumber: estimate Eviews.*

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel belanja modal dan indeks pembangunan manusia adalah  $< 10$ . Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas di antara variabel-variabel dalam penelitian ini.

### ***Uji Heteroskedastisitas***

**Tabel 3.** Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	3.957966	Prob. F(2,12)	0.0479
Obs*R-squared	5.962009	Prob. Chi-Square(2)	0.0507
Scaled explained SS	7.355389	Prob. Chi-Square(2)	0.0253

*Sumber: estimate Eviews.*

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Breusch-pagan-godfrey*, menunjukkan bahwa nilai Prob. *Chi-Square* pada *Obs\*R-squared* sebesar  $0,0507 > 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

**Uji Autokorelasi****Tabel 4.** Hasil Uji Autokorelasi.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.000670	Prob. F(2,10)	0.9993
Obs*R-squared	0.002009	Prob. Chi-Square(2)	0.9990

*Sumber: estimate Eviews.*

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai probabilitas sebesar  $0,9990 > 0,05$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi.

**Uji Regresi Linear Berganda****Tabel 5.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.841435	0.718329	3.955620	0.0019
Belanja Daerah	0.023187	0.022433	1.033598	0.3217
Indeks Pembangunan Manusia	1.227161	0.701309	1.749816	0.1057
R-squared	0.216578	Mean dependent var		3.974667
Adjusted R-squared	0.086008	S.D. dependent var		1.442606
S.E. of regression	1.379174	Akaike info criterion		3.657703
Sum squared resid	22.82545	Schwarz criterion		3.799313
Log likelihood	-24.43277	Hannan-Quinn criter.		3.656195
F-statistic	1.658707	Durbin-Watson stat		1.917841
Prob(F-statistic)	0.231193			

*Sumber: estimate Eviews.***Uji Hipotesis****Uji Secara Parsial (Uji t)**

Untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, digunakan uji t-statistik. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah jika nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05), maka variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan; sebaliknya, jika lebih besar, pengaruhnya tidak signifikan.

- Hasil estimasi koefisien variabel Belanja Daerah sebesar 0,0231 dan signifikansi pada prob sebesar  $0,3217 > 0,05$ , yang berarti Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Meskipun secara matematis menunjukkan hubungan positif, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, jika terjadi peningkatan belanja daerah sebesar 1 persen, maka Pertumbuhan Ekonomi belum

tentu mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,0232 persen. Sebaliknya, penurunan Belanja Daerah juga belum tentu berdampak signifikan terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi dalam satu tahun, dengan asumsi *ceteris paribus*.

- b. Hasil estimasi koefisien variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1,2271 dan signifikansi pada prob sebesar  $0,1057 > 0,05$ , yang juga berarti Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Secara matematis, hubungan yang ditunjukkan adalah positif, tetapi secara statistik tidak signifikan. Sehingga, jika terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1 poin, maka Pertumbuhan Ekonomi tidak mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 1,2272 persen. Begitu juga sebaliknya, jika IPM menurun, maka penurunan tersebut tidak secara signifikan berdampak terhadap penurunan Pertumbuhan Ekonomi dalam satu tahun, dengan asumsi *ceteris paribus*.

#### ***Uji Simultan (Uji-F)***

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. Maka berdasarkan hasil output regresi dari Eviews pada tabel 4.4, nilai Prob (F-statistic) sebesar  $0,231193 > \alpha = 0,05$ . Nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ( $0,2312 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas di Provinsi Aceh.

#### ***Uji Koesisien Determinasi ( $R^2$ )***

Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat. Adapun output regresi, diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0,216578 dan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,086008. Nilai R-squared menunjukkan bahwa sebesar 21,66% variasi dari variabel Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas dapat dijelaskan oleh variabel bebas, yaitu Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan sisanya sebesar 78,34% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini. Seperti; investasi, tingkat pengangguran, inflasi, pajak, subsidi, ekspor-impor, perdagangan internasional, nilai tukar dan konsumsi rumah tangga.

#### **Pembahasan**

##### ***Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas di Provinsi Aceh***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi Aceh. Secara empiris, arah koefisien yang positif mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah cenderung

diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor non-migas, meskipun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja daerah belum mampu memberikan dorongan yang optimal terhadap aktivitas ekonomi non-migas di Aceh. Kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh struktur dan kualitas alokasi belanja daerah. Meskipun belanja daerah mengalami fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun, peningkatan belanja tersebut tidak selalu diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas, seperti industri pengolahan, UMKM, dan sektor jasa produktif. Sebagian belanja daerah masih didominasi oleh belanja rutin dan belanja operasional, sehingga dampaknya terhadap peningkatan output ekonomi relatif terbatas. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Lestari dan Fitriyati (2014) serta Sutono et al. (2022) yang menyatakan bahwa belanja pemerintah tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya ketika efektivitas dan efisiensi belanja belum optimal. Namun, temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Setiawan dan Budiana (2015) yang menemukan pengaruh signifikan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa jenis dan komposisi belanja menjadi faktor kunci dalam menentukan dampak belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### ***Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas di Provinsi Aceh***

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi Aceh. Secara teoretis, peningkatan IPM mencerminkan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang seharusnya berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas dalam jangka pendek. Salah satu penjelasan atas temuan ini adalah adanya *time lag* antara peningkatan kualitas pembangunan manusia dan dampaknya terhadap kinerja ekonomi. Peningkatan pendidikan dan kesehatan tidak serta-merta langsung meningkatkan output ekonomi, melainkan memerlukan waktu agar kualitas sumber daya manusia tersebut dapat terserap secara optimal dalam sektor-sektor produktif. Selain itu, keterbatasan lapangan kerja produktif dan struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi sektor primer juga membatasi kontribusi peningkatan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi non-migas. Temuan ini sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2013) yang menyatakan bahwa dampak pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat jangka panjang. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Lestari dan Fitriyati (2014) serta Sutono et al. (2022) yang

menemukan bahwa IPM tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Saragih dan Azansyah (2024) yang menemukan pengaruh signifikan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional, yang menunjukkan adanya perbedaan karakteristik ekonomi antar wilayah.

***Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Secara Simultan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi tanpa Migas di Provinsi Aceh***

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa belanja daerah dan Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi Aceh. Temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi kebijakan fiskal daerah dan peningkatan kualitas pembangunan manusia belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi non-migas selama periode penelitian. Secara empiris, nilai koefisien determinasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pertumbuhan ekonomi tanpa migas dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Faktor-faktor tersebut antara lain investasi swasta, struktur sektor ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, stabilitas makroekonomi, serta iklim usaha daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Aceh tidak hanya ditentukan oleh belanja daerah dan IPM, tetapi juga sangat bergantung pada dinamika sektor riil dan kondisi ekonomi makro. Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Saragih dan Azansyah (2024) yang menemukan pengaruh signifikan belanja pemerintah dan IPM secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa karakteristik daerah, struktur ekonomi, dan efektivitas kebijakan publik berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam konteks Aceh, ketergantungan historis terhadap sektor migas dan keterbatasan pengembangan sektor non-migas menjadi faktor yang membatasi dampak belanja daerah dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, hasil pembahasan simultan menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah dan IPM perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan sektor non-migas yang lebih terarah dan berkelanjutan. Tanpa penguatan sektor produktif dan peningkatan investasi, peningkatan belanja dan pembangunan manusia belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Provinsi Aceh.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis empiris terhadap data tahun 2009–2023, penelitian ini menyimpulkan bahwa belanja daerah dan Indeks Pembangunan Manusia secara parsial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas

di Provinsi Aceh. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Temuan ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian, belanja daerah dan peningkatan kualitas pembangunan manusia belum menjadi faktor utama yang secara statistik mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sektor non-migas di Aceh. Kesimpulan ini didasarkan sepenuhnya pada hasil pengujian model dan tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi di luar konteks wilayah dan periode penelitian.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dengan memfokuskan belanja daerah pada sektor-sektor non-migas yang produktif dan berdaya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia perlu diintegrasikan dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor ekonomi agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berdampak lebih nyata terhadap kinerja ekonomi daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah variabel yang digunakan serta pendekatan analisis yang bersifat statis, sehingga belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi tanpa migas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel tambahan seperti investasi, pengangguran, dan struktur sektor ekonomi, serta menggunakan metode analisis yang lebih dinamis agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses penyusunan penelitian hingga penulisan artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Jurusan serta Ketua Program Studi (Kaprodi) Ekonomi Pembangunan atas dukungan akademik, arahan, dan fasilitasi yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian ini. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi penulis yang berjudul “Pengaruh Belanja Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas di Provinsi Aceh”.

## DAFTAR REFERENSI

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks pembangunan manusia Provinsi Aceh*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Produk domestik regional bruto Provinsi Aceh menurut lapangan usaha*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Boediono. (2002). *Ekonomi makro*. BPFE.
- Boediono. (2014). *Teori pertumbuhan ekonomi*. BPFE.
- Boediono. (2016). *Ekonomi Indonesia dalam lintasan sejarah*. LP3ES.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2022). *Econometrics by example*. Palgrave Macmillan.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Lestari, S., & Fitrayati, D. (2014). Pengaruh belanja pemerintah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 2(3), 1–10.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Sabir, M., Aimon, H., & Bachtiar, N. (2015). Pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 123–134. <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i2.509>
- Saragih, A. H., & Azansyah, M. (2024). Pengaruh belanja pemerintah dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(1), 45–58. <https://doi.org/10.23917/jep.v25i1.20245>
- Setiawan, M., & Budiana, D. (2015). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(2), 90–102. <https://doi.org/10.23917/jep.v16i2.2313>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutono, S., Nugroho, S., & Rahmawati, D. (2022). Pengaruh belanja pemerintah pusat dan daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Regional*, 14(1), 55–68. <https://doi.org/10.36986/jer.v14i1.1234>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Economic development* (11th ed.). Pearson Education.
- Yasin, M., Hadi, S., & Putra, R. A. (2020). Determinan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 101–115. <https://doi.org/10.14203/jep.21.2.2020.101-115>